



PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PROSES PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PADA BAPPEDA KOTA MATARAM

Dimas Aldy Wibowo¹, Elin Erlina Sasanti², Nurabiah³

^{1,2,3} Universitas Mataram

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Mei 2023

Disetujui: 22 Juli 2023

Dipublikasikan: 28

September 2023

Kata kunci:

Sistem Informasi
Pemerintahan
Daerah (SIPD),
Efektifitas,
Administrasi
Keuangan, TAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap proses penatausahaan keuangan pada Bappeda Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan divalidasi melalui dokumen. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan pada penelitian ini adalah Bendahara Pengeluaran Bappeda Kota Mataram. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam melakukan proses penatausahaan keuangan pada Bappeda Kota Mataram dengan menggunakan model TAM sudah baik, meskipun penggunaan SIPD dari aspek Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*) belum maksimal meningkatkan kinerja dan produktivitas operasional organisasi; aspek Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*) sudah baik dikarenakan SIPD memiliki bahasa dan menu-menu yang bisa dipahami, selain itu urutan dalam melakukan proses penatausahaan menjadi lebih terstruktur; aspek Sikap terhadap Perilaku Persepsian (*Attitude Towards Behavior*) menunjukkan bahwa sistem sebelumnya yakni SIMDA lebih nyaman digunakan dikarenakan SIPD masih mengalami kendala *error* namun memiliki kelebihan seperti dapat diakses dari berbagai alat elektronik kapan saja tanpa terbatas waktu; aspek Minat Perilaku (*Behavioral Intention*) dimana penerapan SIPD didukung dan akan tetap digunakan dalam melakukan informasi keuangan khususnya penatausahaan keuangan; aspek Perilaku (*Behavior*) oleh karyawan merasa cukup puas dalam menggunakan SIPD dibandingkan dengan sistem sebelumnya (SIMDA), meskipun karyawan masih memerlukan waktu untuk beradaptasi agar dapat menggunakan SIPD secara maksimal.

IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEMS TO THE ADMINISTRATION PROCESS OF REGIONAL FINANCE IN MATARAM CITY BAPPEDA

Keywords:

Abstract

*Local
Government
Information
System (SIPD),
Effectiveness,
Financial
Administration,
TAM*

This study aims to determine the effectiveness of the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on the financial administration process at Bappeda Mataram City. This study used a descriptive qualitative approach and collected data through interviews, which is validated through documents. The data obtained was analyzed with the Miles and Huberman model namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The informant in this study was the Expenditure Treasurer of Bappeda Mataram City. The results of this study indicate that the application of the Local Government Information System (SIPD) in carrying out the financial administration process at Bappeda Mataram City using the TAM model is good, although the use of SIPD from the Perceived Usefulness aspect has not maximally improved the performance and productivity of organizational operations; the Perceived Ease of Use aspect is good because SIPD has a language and menus that can be understood, besides that the sequence in carrying out the administration process becomes more structured; The Attitude Towards Behavior aspect shows that the previous system, namely SIMDA, is more comfortable to use because SIPD still experiences error problems but has advantages such as being able to be accessed from various electronic devices at any time without being limited in time; the Behavioral Intention aspect where the application of SIPD is supported and will continue to be used in conducting financial information, especially financial administration; the Behavior aspect (Behavior) by employees feels quite satisfied in using SIPD compared to the previous system (SIMDA), although employees still need time to adapt in order to use SIPD optimally.

© 2023 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉ Alamat korespondensi:

dimasaldyw@gmail.com¹, elinerlina@unram.ac.id², nurabiah@unram.ac.id³

PENDAHULUAN

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna mempermudah proses pengelolaan data keuangan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 391 dan 395 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan informasi pemerintah daerah, yang dikelola dalam suatu sistem pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengelola wilayahnya secara mandiri dengan adanya Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pengadaan dukungan sumber informasi keuangan daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi (Dewi and Mariska, 2018).

Hal di atas dipertegas dengan Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun

2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dimana Pemda diharuskan untuk mengimplementasikan SIPD dalam pengelolaan informasi pemerintah daerah.

Penerapan SIPD pada tahun 2020 belum maksimal khususnya pada modul penatausahaan yang belum mampu dilaksanakan secara penuh. Pemerintah daerah kembali menggunakan SIMDA keuangan dalam proses penatausahaan dikarenakan pemerintah daerah masih tertatih-tatih dalam mengimplementasikan SIPD. Penerapan SIPD pada Bappeda Kota Mataram menyebabkan adanya masa transisi penggunaan SIMDA ke SIPD. SIPD yang belum konsisten membuat Bappeda Kota Mataram menggunakan SIMDA dan SIPD secara paralel. SIMDA Keuangan kembali digunakan sebagai pilihan dalam melakukan kegiatan penatausahaan keuangan sehingga terjadinya *hybrid* sistem.

Adapun penelitian yang membahas mengenai kendala terhadap proses penatausahaan keuangan daerah pada penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) seperti yang dilakukan Vitriana et al., (2022), Nasution & Nurwani, (2021), Selviana et al., (2021) dan Wahida et al., (2022). Penelitian yang dilakukan Vitriana et al., (2022) menyatakan proses penatausahaan keuangan masih banyak hambatan dan kendala sehingga proses penatusahaan keuangan tidak berjalan sesuai tata waktu yang telah ditetapkan.

Penelitian ini diperkuat oleh teori *Technology Acceptance Modal* (TAM), TAM merupakan teori sistem informasi yang membuat model tentang bagaimana pengguna mau menerima dan menggunakan teknologi. Model ini mengusulkan bahwa ketika pengguna ditawarkan untuk menggunakan suatu sistem yang baru, sejumlah faktor mempengaruhi keputusan mereka tentang bagaimana dan kapan akan menggunakan sistem tersebut Saputra et al., (2018). Teori ini berasumsi bahwa pengguna teknologi atau sistem informasi ditentukan oleh beberapa faktor khususnya dalam hal: *usefulness* (pengguna yakin bahwa dengan menggunakan sistem ini akan meningkatkan kinerjanya), *ease of use* (di mana pengguna yakin bahwa menggunakan sistem ini akan membebaskannya dari kesulitan, dalam artian bahwa sistem ini mudah dalam penggunaannya).

Tingkat keberhasilan penerapan SIPD terhadap proses penatausahaan keuangan daerah dapat ditinjau dari beberapa indikator keberhasilan. Davis, (1989) menyatakan *Technology Acceptance Model* (TAM) berhubungan dengan variabel teknologi dan variabel pemanfaatan, di mana jika seseorang merasa bahwa

penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan kinerjanya, maka orang itu akan terus menggunakan teknologi tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini tidak hanya menganalisis indikator dari efektivitas penerapan SIPD, tetapi akan menjelaskan secara rinci setiap hambatan yang dihadapi Bappeda Kota Mataram dalam penggunaan SIPD dari setiap indikator tingkat efektivitas.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah (Murni, 2022). Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti (Sugianto, 2022). Penelitian deskriptif berusaha menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu populasi, situasi atau fenomena secara akurat dan sistematis.

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah melalui wawancara dan juga pendukung lainnya berupa observasi dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti. Jenis observasi yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Dalam observasi ini peneliti ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dengan tujuan informasi yang diperoleh lebih tajam (Yanto and Akfir, 2019). Eaterberg (2002) menfinisikan wawancara atau Interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugianto, 2022). Wawancara dilakukan secara langsung dengan Bendahara Pengeluaran Bappeda Kota Mataram. Narasumber tersebut dipilih karena terlibat langsung dalam penerapan SIPD hingga proses penatausahaannya. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, teknik wawancara ini menggunakan pertanyaan terbuka, dengan mengedepankan sikap etis terhadap informan yang diteliti. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan, dan pengetahuan (Mekarisce, 2020). Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti wawancara. Jika dibandingkan dengan wawancara yang selalu

berkomunikasi dengan orang atau narasumber, berbeda dengan observasi yang tidak terbatas pada orang tetapi juga pada objek alam yang lain (Yanto and Akfir, 2019). Diharapkan dengan melakukan pengamatan yang lebih mendalam dapat memberikan data yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa foto, rekaman suara dan video saat melakukan wawancara.

Setelah data lapangan diperoleh, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2021). Menurut Miles dan Huberman, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga dapat memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan oleh peneliti. Penyajian data kualitatif biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Kemudian penyajian data dilakukan dalam penelitian kualitatif biasanya dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dengan grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*. Penyajian data dalam penelitian ini adalah kegiatan menyajikan data-data hasil wawancara yang telah direduksi sebelumnya ke dalam bentuk kata-kata atau penjelasan agar dapat memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan, langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal masih bersifat sementara, jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Hal ini dikarenakan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus mengalami perkembangan setelah peneliti berada di lapangan (Saleh, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Technology Acceptance Model (TAM) atau model penerimaan teknologi diperkenalkan oleh Fred D. Davis pada tahun 1986 merupakan teori yang dianggap berpengaruh dan paling umum dalam menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan suatu teknologi informasi. TAM berhubungan dengan variabel teknologi dan variabel pemanfaatan, di mana jika seseorang merasa bahwa penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan kinerjanya, maka orang itu akan terus menggunakan teknologi tersebut. Sasaran dari TAM adalah untuk menyediakan sebuah penjelasan dari pengaruh faktor eksternal terhadap kepercayaan, sikap dan tujuan dari penggunaan sistem. Keberadaan suatu teknologi sistem informasi yang baru dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Mataram menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi seluruh pekerjaan yang akan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan akan berbeda dengan sistem informasi sebelumnya (SIMDA). Akan tetapi keberadaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Bappeda Kota Mataram dapat dikatakan cukup berdaya guna dalam membantu proses penatausahaan keuangan, hal ini dikarenakan fakta dalam penggunaan SIPD sebagian besar sudah sesuai dengan indikator yang terdapat dalam teori TAM.

Pada persepsi kegunaan dapat diketahui bahwa persepsi kegunaan terkait penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPD) belum berdasarkan teori yakni *Technology Acceptance Model* (TAM), dimana dapat dilihat pada penerapan SIPD yang belum maksimal karena penggunaan SIPD dalam melakukan proses penatausahaan keuangan tidak dapat membantu menyelesaikan proses penatausahaan keuangan dengan cepat sehingga belum mampu meningkatkan kinerja maupun produktivitas. Kemudian persepsi kemudahan penggunaan secara umum dalam penggunaan SIPD bisa dikatakan sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) karena bahasa dan menu yang terdapat pada SIPD bisa dipahami, selain itu urutan proses penatausahaan keuangan daerah memiliki langkah-langkah pengerjaan yang terstruktur. Mengenai persepsi sikap terhadap perilaku, Bendahara Pengeluaran mengakui bahwa SIPD merupakan sebuah sistem yang penting untuk digunakan dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah pada Bappeda Kota Mataram karena SIPD merupakan perintah langsung dari pemerintah pusat melalui Permendagri No. 70 tahun 2019 tentang SIPD yang telah ditetapkan. Meskipun

dalam penerapannya Bendahara Pengeluaran lebih nyaman menggunakan sistem sebelumnya (SIMDA) dibandingkan dengan SIPD meskipun masih terdapat beberapa kendala, namun seiring dengan update yang dilakukan pada SIPD mampu mengurangi kendala-kendala yang sedang dihadapi sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi sikap terhadap perilaku sebagian besar sudah berdasarkan teori *Technology Acceptance Model* (TAM).

Pada minat perilaku persepsian terhadap perkembangan SIPD, Bappeda Kota Mataram akan terus menggunakan sistem tersebut sesuai dengan kebijakan yang berlaku dari pemerintah pusat meskipun dalam penerapannya masih membutuhkan waktu adaptasi dan belajar untuk dapat lebih memahami pengaplikasian SIPD. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa minat perilaku (*Behavior Intention*) Bendahara Pengeluaran dalam pengaplikasian SIPD sudah sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), dimana terdapat motivasi untuk terus berusaha beradaptasi sehingga dapat memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara optimal. Selanjutnya, untuk persepsi perilaku terhadap penerapan SIPD dapat diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran cukup puas menggunakan SIPD dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah meskipun masih terdapat beberapa kendala baik itu dari sistem itu sendiri (eksternal) maupun dari user (internal). Namun seiring dengan beberapa update yang sudah dilakukan sehingga mampu mengurangi masalah yang sedang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi minat perilaku terkait efektivitas SIPD sudah sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM).

PENUTUP

Technology Acceptance Model (TAM) yang terdiri atas 5 (lima) model pengukuran utama yakni Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*); Kemudahan Penguunaan Persepsian (*Perceived Ease of Use*); Sikap terhadap Perilaku (*Attitude Towards Behavior*); Minat Perilaku (*Behavioral Intention*); dan Perilaku (*Behavior*). Pada persepsi kegunaan dapat diketahui bahwa penerapan SIPD dalam melakukan proses penatausahaan keuangan daerah yang belum maksimal karena belum mampu meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas, membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan tepat waktu.

Kemudian untuk persepsi kemudahan penggunaan dalam pengaplikasian SIPD dapat dipahami meskipun masih membutuhkan waktu untuk adaptasi, selain itu SIPD memiliki menu-menu atau fitur yang lebih banyak dan kompleks dibandingkan dengan sistem sebelumnya (SIMDA). Bahasa dan menu-menu yang ada pada SIPD bisa

dipahami, selain itu urutan dalam melakukan proses penatausahaan terstruktur. SIPD dapat menghasilkan laporan informasi keuangan secara digital/*online* yang langsung terintegrasi dengan sistem pemerintahan pusat. Kemudian SIPD dapat diakses dari berbagai alat elektronik tidak terbatas waktu dan tempat. Untuk sikap terhadap perilaku persepsian dapat dikatakan bahwa SIPD merupakan sistem yang penting untuk digunakan dalam pengelolaan informasi keuangan. Meskipun dalam pengaplikasiannya, Bendahara Pengeluaran masih merasa nyaman menggunakan sistem sebelumnya (SIMDA) dibandingkan dengan SIPD karena alur proses penatausahaan keuangan yang lebih panjang, menu-menu yang belum memenuhi semua kebutuhan pengguna tetapi seiring berjalannya waktu SIPD terus mengalami update sehingga masalah masalah yang sedang dihadapi.

Mengenai minat perilaku persepsian dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Mataram akan tetap dan mendukung penggunaan SIPD dalam pengelolaan informasi keuangan dikarenakan SIPD merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus untuk diterapkan. Meskipun dalam penerapannya belum diadakan pelatihan khusus/secara tatap muka mengenai pengaplikasian SIPD, Bendahara Pengeluaran akan terus beradaptasi dan belajar agar dapat menggunakan SIPD secara optimal dalam melakukan penatausahaan keuangan. Dan untuk perilaku persepsian dapat disimpulkan bahwa Bendahara Pengeluaran cukup merasa puas dalam menggunakan SIPD hal ini meskipun Bendahara Pengeluaran masih merasa lebih nyaman menggunakan sistem sebelumnya (SIMDA) dibandingkan dengan SIPD. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah karena SIPD masih mengalami kendala error, menu-menu yang belum dapat mengcover semua kebutuhan pengguna, dan alur proses penatausahaan keuangan menjadi lebih panjang jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya. Kendala eksternal yang dihadapi yakni pemahaman yang belum maksimal sehingga Bendahara Pengeluaran masih memerlukan waktu beradaptasi dalam penggunaan SIPD. Namun seiring dengan beberapa update yang sudah dilakukan sehingga mampu mengurangi masalah yang sedang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F.D. (1989) 'Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology', *JSTOR*, 13(3), pp. 319–420. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/249008>.
- Dewi, N.C. and Mariska, S. (2018) 'Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan pada Pemerintahan Kota Pariaman', & *AI-Masraf(Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan)*, 3(1), pp. 63–70.

- Mekarisce, A.A. (2020) 'Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif di bidang kesehatan masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(3), pp. 145–151. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.
- Murni (2022) *11 jenis penelitian kualitatif yang umum digunakan, ketahui perbedaannya*, *Pedoman Media Siber*. Available at: <https://profesi-unm.com/2022/01/22/11-jenis-penelitian-kualitatif-yang-umum-digunakan-ketahui-perbedaannya/> (Accessed: 8 November 2022).
- Nasution, M.I. and Nurwani (2021) 'Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), p. 109. Available at: <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>.
- Saleh, S. (2017) *Analisis Data Kualitatif*. Pertama. Edited by H. Upu. Makassar: Pustaka Ramadhan.
- Saputra, R., Mulki, G.Z. and Firdaus, H. (2018) 'Efektivitas Sistem Informasi Government and City Landmark (GENCIL) terhadap kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak', *JeLAST*, 5(2), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jelast.v5i2.29128>.
- Selviana, Rochmah, A.L. and Galuh, P.S. (2021) *Laporan Kuliah Kerja Magang (KKM) penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah (SETDA) Kabupaten Jombang bagian perencanaan dan keuangan*. Jombang. Available at: <http://repository.stiedewantara.ac.id/2248/1/LAPORAN%20KULIAH%20KERJA%20MAGANG%20-%20SETDAKAB%20JBG%20PERENCANAAN.pdf> (Accessed: 8 January 2023).
- Sugianto (2022) *Penelitian kualitatif, manfaat dan alasan penggunaan*, *Binus University*. Available at: <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/#:~:text=Tujuan%20penelitian%20kualitatif%20adalah%20untuk,detail%20suatu%20data%20yang%20diteliti>. (Accessed: 7 November 2022).
- Sugiyono (2021) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B*. 3rd edn. Edited by Sutopo. Bandung: ALFABETA.
- Vitriana, N., Agustawan and Ahyaruddin, M. (2022) 'Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru', *DIGIBIS : Digital Business Journal*, 1(1), pp. 64–77. Available at: <http://jurnal.umat.ac.id/index.php/digibis64>.
- Wahida, F., Animah and Jumaidi, L.T. (2022) 'Pelaksanaan dan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Sekretariat Daerah Kota Mataram', *JURNAL AKBIS*, 6(1), pp. 20–27. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.35308/akbis.v6i1.5265>.
- Yanto, E. and Akfir (2019) 'Analisis penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan)', *Indonesian Journal Of Strategic Management*, 3(1), pp. 44–59. Available at: <https://doi.org/10.25134/ijsm.v3i1.2819> p-ISSN.